

PWI dan Fakultas Hukum UM Sumatera Utara Jalin Kerjasama Akademik

Jum'at, 17-06-2011

Medan- Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sumatera Utara (PWI Sumut) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menandatangani naskah kerjasama (memorandum of understanding-MoU) di bidang akademik. Diawali kegiatan Diskusi Publik "Hak Jawab, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik" atas dukungan Asian Agri Group.

Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan Dekan Fakultas Hukum UMSU Farid Wajdi SH, MHum dan Ketua PWI Cabang Sumut Drs. Muhammad Syahrir disaksikan Rektor UMSU diwakili Pembantu Rektor III M Arifin SH MHum, Kapolda Sumut diwakili Kababinkum Kombes Pol John Hendri, unsur

Pengurus PWI Cabang Sumut serta manajemen Asian Agri Group diwakili Head Stakeholder Freddy Widjaya dan Humas Lidia Veronika di Aula Kampus UMSU Jalan Mukhtar Basri Medan, Selasa (14/6).

Butir-butir MoU yang disepakati, antara lain mencakup kerjasama di bidang pendidikan, jurnalisme dan informasi berdasarkan kepakaran yang ada dari kedua belah pihak. Melakukan kegiatan penelitian, seminar atau diskusi, pelatihan dan keterampilan terkait jurnalistik, serta kerjasama akademik lainnya yang mendukung peningkatan kualitas proses belajar-mengajar.

Pembantu Rektor III M Arifin SH MHum, Dekan Fakultas Hukum UMSU Farid Wajdi SH, MHum maupun Ketua PWI Cabang Sumut Drs. Muhammad Syahrir dalam sambutannya menyampaikan ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas terjalinnya kerjasama tersebut. Dan secara khusus menyampaikan terimakasih atas dukungan Asian Agri Group yang mengawali kerjasamadengan menggelar kegiatan diskusi publik.

"Mudah-mudahan kerjasama yang terjalin dapat lebih memacu upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, baik dari sisi keilmuan khususnya di bidang hukum maupun dari sisi teknis kemampuan jurnalistik. Sehingga ke depan mampu melahirkan lebih banyak lagi wartawan berkualifikasi profesional," ujar Ketua PWI Sumut Drs. Muhammad Syahrir.

Sementara Head Stakeholder Asian Agri Group Freddy Widjaya menyambut positif kerjasama yang terjalin serta diikutkannya perusahaan yang bergerak di bidang industri perkelapasawitan itu berkontribusi dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang disepakati melalui program corporate social responsibility (CSR).

"Dukungan ini bukan yang pertama. Sejak tahun 2005, Asian Agri Group dan PWI Sumut terus menjalin kerjasama. Tidak hanya di bidang peningkatan kualitas keanggotaan PWI melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan, tapi juga melakukan pelatihan 1.000 guru bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumut," jelasnya.

Selain itu, kata Freddy Widjaya, Asian Agri melalui Tanoto Foundation juga aktif memberikan bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi diberbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SLTA maupun Perguruan Tinggi. "Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan Asian Agri dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Freddy.

Hak Jawab

Praktisi pers, War Djamil SH, salah seorang pembicara dalam diskusi menegaskan, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pers memberi ruang kepada seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang disebut Hak Jawab.

Namun idealnya, menurut War Djamil, ketika Hak Jawab telah disahuti media massa semestinya tidak lagi disertai melakukan gugatan pencemaran nama baik ke pengadilan atas dasar KUHP. "Begitu juga ketika dimediasi melalui Dewan Pers, semestinya putusan Dewan Pers dihormati oleh semua pihak," tegasnya.

Sementara Farid Wajdi SH MHum menilai, sengketa atas pemberitaan media massa merupakan pilihan terakhir karena bertentangan dengan semangat kebebasan pers. "Jalur pengadilan ditempuh disebabkan dua kemungkinan. Pertama, tidak tercapai kesepakatan lewat jalur non pengadilan.

Kedua, pihak yang merasa dirugikan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan mekanisme UU Pers dalam dunia jurnalistik," terangnya. Di lain sisi, Kepala Pusat Studi Hak Azasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan Majda El Muhtaj yang juga tampil sebagai pembicara mengupas tentang jurnalisme berbasis HAM.

Menurutnya, ada empat langkah yang perlu dilakukan. Pertama, dibutuhkan komitmen yang teruji dari penegak hukum untuk tunduk pada mekanisme penyelesaian berbasis HAM jurnalis. Kedua, perlunya penguatan kelembagaan pers dan insan pers dalam memperkuat profesi jurnalis berbasis HAM.

Ketiga, adanya komitmen pada peningkatan kesejahteraan insan pers yang mendukung kemandirian dan profesionalitas. Dan keempat, perlunya kolaborasi intensif dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengampanyekan kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan pers. (www.umsu.ac.id)